

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan sistem politik demokrasi liberal yang menjunjung tinggi perdamaian. Fakta tersebut nyatanya lahir dari keinginan besar masyarakat Korea untuk terbebas dari bangsa kolonial. Titik balik dari fakta ini juga dipengaruhi oleh hubungan kuat secara historikal antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Selama era kolonial Jepang yang sangat menyengsarakan masyarakat Semenanjung Korea, keinginan untuk merdeka terus memuncak hingga gelombang gerakan kemerdekaan di seluruh Korea terbentuk. Hwang Ki Hwan adalah salah satu tokoh diplomatik yang dapat dikatakan sebagai penghubung bagaimana Korea diakui negara dunia sebagai negara yang mampu membentuk otonomi wilayahnya secara independen. Hwang merupakan seorang tentara Amerika Serikat yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai orang Korea. Hwang menjadi aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan mutlak untuk orang Korea dan menolak segala otonomi dan reformasi negara Jepang (Peace Maker, 2023).

Setelah gerakan Satu Maret pada 1919, terbentuklah *Provisional Government* di Semenanjung Korea. Hwang melanjutkan aktivitas diplomatiknya dengan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal delegasi Korea oleh Kim Kyu Shik di *Provisional Government*, guna menjangkau lebih luas pemerintahan global demi keabsahan kemerdekaan Korea dan ketidakabsahan tindakan Jepang di seluruh dunia dalam *Paris Peace Conference*. Hwang menerbitkan buklet dengan judul "*The Independence and Peace of Korea*". Upayanya berlanjut dengan mengangkat isu kemerdekaan Korea kepada politis Inggris, dan setelahnya terbentuk "*Great British Empire Korean Friendship Association*" yang terdiri dari 62 tokoh Inggris serta 17 anggota parlemen Inggris. Dan kemudian pada 12 Juni 1921, Hwang Ki Hwan secara aktif mengirimkan gagasan diplomatik ke Jepang, dengan membagikan sebuah cetakan dengan judul "*The Appeal of the Korean People for Liberation from*

Japan". Secara langsung, ia menghadiri konferensi kekaisaran di Inggris untuk membagikan cetakan tersebut kepada perdana menteri hingga Duta Besar Jepang Konsuke Hayashi (Peace Maker, 2023).

Sejumlah tokoh diplomatik pejuang kemerdekaan seperti Hwang Ki Hwan dan Kim Kyu Shik, menjadi titik awal bagaimana ketertarikan kekuatan besar seperti Amerika Serikat memberikan pengaruh kepada *Provisional Government* di Semenanjung. Selama Kim pergi ke Amerika Serikat dalam melakukan aktivis diplomatik untuk kemerdekaan Korea, Hwang ditunjuk sebagai pemimpin komite Korea. Dan dalam mencapai agenda, upaya diplomatik berlanjut dimana Hwang bersama Rhee Syngman mempersiapkan *Washington Conference* pada November 1921 untuk menangani masalah yang tidak terselesaikan di Konferensi Perdamaian Paris. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh diplomatik Korea dalam urusan global berhasil mengenalkan Korea kepada dunia sebagai sebuah wilayah yang mampu terbebas dari bangsa imperialis (Yonhap News Agency, 2019).

Pasca terbebasnya Korea dari pemerintah kolonial Jepang pada Agustus 1945, Amerika Serikat memberikan pengaruhnya dengan mendirikan *the U.S. Army Military Government in Korea* (USAMGIK) pada 11 September dan memulai pemerintahan militer mereka selama tiga tahun. Pembentukan pemerintahan militer tersebut di bawah oleh Letnan Jenderal John R. Hodge dengan memiliki 72.000 pasukan Korps Angkatan Darat AS XXIV. Ini merupakan penajakan awal bagaimana *Republic of Korea* (ROK) terbentuk setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet menolak untuk menyetujui rencana pemulihan kedaulatan negara Korea yang dipersatukan kembali. Bergeser di tahun 1948, terbentuklah dua wilayah dengan ideologi berbeda, yakni wilayah bagian utara *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) & wilayah bagian selatan *Republic of Korea* (ROK) yang dipimpin oleh Rhee Syngman atas pemilihan suara di bawah pengawasan UNTCOK (*United Nations Temporary Commission on Korea*) (Matray dan Boose, Jr, 2014; 23-26). Hingga pada tahun 1950, perang di Semenanjung Korea pecah dan Amerika mulai memasok kebutuhan dalam berperang untuk melawan invasi Korea Utara sampai pertempuran berakhir atas gencatan senjata di tahun 1953 (Gusfianda dan Indrawati, 2017: 187).

Salah satu politik luar negeri yang ditempuh Korea Selatan ialah aliansi pertahanan. Sejak 1953, Korea Selatan bersama AS melakukan Perjanjian Pertahanan Bersama (*Mutual Defense*) dengan membentuk aliansi sebagai benteng hegemoni kekuatan komunis. Perjanjian pertahanan bersama antara Korea Selatan dan AS muncul setelah perang Korea dalam konteks konfrontasi perang dingin. Kerjasama aliansi pertahanan dilakukan bersifat jangka panjang dalam hubungan pertahanan dan keamanan dimana hingga saat ini hubungan tetap terjalin (Gusfianda dan Indrawati, 2017: 187-188).

Sejarah mencatat Korea Selatan sudah bertransformasi menjadi negara yang mapan serta independen dalam membuat pertahanan negaranya sebagai republik mengedepankan kedaulatan rakyat. Berdirinya Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pada 1948, menandai titik *start* negara ini mendirikan lembaga departemen untuk menangani permasalahan pertahanan dan keamanan. Menjadi progresivitas pertama di bidang pertahanan, kehadiran lembaga Kemenhan Nasional Korea Selatan menggantikan Departemen Keamanan Internal bertugas di bawah Pemerintah Militer Angkatan Darat Amerika di Korea Selatan (Kim Ki Joo, 2014). Secara empiris, sejak awal Korea Selatan sudah menunjukkan kemandirian dalam menangani permasalahan keamanan negaranya secara berdaulat.

Kontribusi dari kerjasama membangun progresivitas kemiliteran Korea Selatan dalam membentuk pertahanan keamanan yang lebih kuat. Tentu menjadi peluang bagi negara dalam memberlakukan kerjasama sebagai arah positif dalam membentuk *power state*. Dan hingga saat ini, Pemerintah Korea Selatan tetap menjaga hubungan baik atas kerjasama aliansi pada aktivitas kemiliteran seperti pengembangan skill angkatan bersenjata, serta pengembangan alat utama sistem pertahanan. Bahkan, kini ambisi Korea Selatan menunjukkan tingkat *next level* sebagai negara utama pemasok senjata dunia.

Memasuki tahun 2017, Moon Jae In menjadi salah satu presiden Korea Selatan ke-12 mendukung konsep dan sistem liberalis, dilihat dalam keanggotaannya dalam Partai Aliansi Politik Demokrat. Ia dan pemerintahannya secara terbuka membuka pintu kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat hingga Korea Utara. Moon Jae In secara publik juga menyatakan

negaranya mendukung program dan agenda denuklirisasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pernyataan, Moon mendefinisikan Korea Selatan sebagai *responsible middle power*, “*As a responsible middle power that rose from the tragedy of war and has achieved economic development and democratization, Korea intends to make active contributions to world peace and stability*” (Moon 2017) (Bhiswara, 2018). Dewasa ini, kita mengetahui bahwasannya dalam kawasan Asia Timur terdapat kekuatan komunis yang kerap menimbulkan ketegangan politik akibat aktivitas militer. Untuk itu, Korea Selatan lebih bersikap hati-hati dengan menunjukkan *softpower* dalam berdiplomasi untuk menghindari sikap anarki yang mampu menimbulkan ancaman secara regional di lingkup global.

Menariknya, jelang masa akhir jabatan Moon, ia masih menggunakan alat diplomatik untuk sejumlah kebijakan luar negeri dalam membentuk aliansi kuat bersama AS, hingga melakukan upaya pendekatan dalam memberikan terobosan diplomatik bersama Pemerintah Korea Utara (Gunawan, 2022). Kepada publik, Presiden Moon menjanjikan sejumlah upaya dalam menciptakan hubungan diplomatik secara kemanusiaan bersama Amerika Serikat dan Korea Utara. Menempatkan posisi negaranya sebagai mediator dan fasilitator, Moon mengusulkan berbagai alat diplomasi dalam misi perdamaian untuk menciptakan denuklirisasi abadi di *Korea Peninsula*. Praktik politik luar negeri tersebut sudah menjadi ciri khas Moon sebagai representatif pemimpin yang mengedepankan moral dan intelektual dalam mengimplementasikan karakter humanis. Praktik Moon tersebut disambut baik pemimpin Amerika Serikat bahkan mendapat simpatik langsung dari Presiden Kim.

Dinamika pun terjadi bagaimana Korea Selatan diambang kedilemaan dalam mengurus dua hal, antara membangun aliansi pertahanan dengan agenda bersamadenuklirisasi. Sejak 2018, Moon maupun Trump sepakat menanggukhan latihan militer dan memperkecil skala penggunaan aset strategis, dirancang untuk mendorong keberlanjutan negosiasi dengan Korea Utara sehingga menunjukkan hasil positif pasca Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang (Stangarone, 2022). Namun pada akhirnya, negosiasi berujung alot dan tidak mengarah pada hasil konkret pada KTT 2018 akibat sikap egoisme yang ditunjukkan Trump kepada Kim

Jong Un. Ini disebabkan ketidaksepakatan antara urusan denuklirisasi dengan keringanan sanksi hingga menyebabkan sampai saat ini belum ada kemajuan nyata dalam denuklirisasi Korea Utara (Kim J. dkk, 2019).

Di tahun 2021, pernyataan Gedung Putih mengungkapkan, Biden bersama Moon menekankan komitmennya memperkuat aliansi ROK-US. Ini merupakan sebuah kunci utama perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut. Kedua pemimpin sepakat untuk segera memetakan kebutuhan strategi komprehensif terkait Korea Utara (DW Indonesia, 2021). Hingga periode kepresidenan Moon berakhir di awal tahun 2022, mengharuskan ia lengser dari jabatan Presiden. Pembatasan masa jabatan satu kali dalam lima tahun, merupakan konstitusi tertulis yang dimiliki negaranya sehingga Moon tidak dapat mencalonkan kembali untuk maju dua periode sebagai presiden. Pemilu pun diadakan pada Maret 2022 dengan Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat dengan masing-masing mengusung Capresnya. Pemilu tersebut dimenangkan Yoon Suk Yeol dari Partai Kekuatan Rakyat berhasil mengantongi 48,59 persen suara (CNN Indonesia, 2022).

Memasuki pergantian rezim di tahun 2022, Yoon Suk Yeol dikenal sebagai tokoh konservatif yang menunjukkan sikap agresivitas sebagai gaya kepemimpinannya. Hal ini telah terlihat dari pernyataan-pernyataan beliau dalam kesempatan kampanye sebelum terpilih sebagai presiden. Merujuk pada studi kasus, pernyataan Presiden Yoon sudah menunjukkan komitmen dan loyalitasnya untuk terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat di bidang militer. Ia juga menyampaikan bahwa serangan preventif merupakan satu-satunya cara untuk menangkal rudal hipersonik Korea Utara yang dipersiapkan untuk perang (CNN Indonesia, 2022).

Pemerintah baru Korea Selatan saat ini mencoba bertindak jauh lebih tegas terhadap Pyongyang, meskipun diperkirakan akan terus menawarkan pembicaraan hubungan lintas batas. Pergeseran rezim terlihat jelas dari langkah awal Presiden Yoon melaksanakan kebijakan politik luar negerinya dalam melanjutkan kerjasama aliansi bersama Amerika Serikat. Dalam meningkatkan pertahanan, Presiden Yoon mengawali keberlanjutan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan yang secara

drastis dikurangi intensitasnya atau ditangguhkan seluruhnya di bawah rezim Moon (Ryall, 2022).

Tahap awal kebijakan Presiden Yoon dalam upaya denuklirisasi dilakukan dengan kesediaannya untuk memberikan bantuan ekonomi bertahap ke Korea Utara, jika negara tersebut mengakhiri pengembangan senjata nuklir dan memulai denuklirisasi. Ia mencoba berkontribusi nyata dengan memberikan bantuan sebagai alat diplomasinya (Puspaningrum, 2022). Progres diplomasi tersebut juga saat ini masih mengalami dinamika akibat ketegangan militer yang kembali muncul disebabkan aksi balas dendam kedua pemimpin konservatif (Yoon Suk-Yeol – Kim Jong Un). Pada akhirnya, peningkatan kembali kekuatan aliansi *ROK-US Alliance* menjadi titik balik Presiden Kim memandang kerjasama tersebut sebagai “*hostile policy*” (Stangarone, 2022).

Diketahui dua program kerjasama aliansi di bidang pertahanan ROK-US mengalami dinamika pada lima tahun terakhir. Dinamika dalam dua program ini disoroti sebab ketidakstabilan skala pada implementasinya. Program pertama yakni denuklirisasi sebagai program *non-proliferasi nuklir*. Korea Selatan dan Amerika Serikat diketahui telah mendandatangani NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*). Dalam perjanjian, posisi kedua negara berbeda pada hal kepemilikan senjata nuklir. Amerika Serikat berada pada posisi *vertikal proliferasi* dan diakui undang-undang atas kepemilikan senjata nuklir. Berdasarkan pemikiran Barry Buzan dalam membagi definisi proliferasi nuklir, posisi *vertikal proliferasi* atau NWS (*Nuclear Weapon States*) mengkhawatirkan adanya *horizontal proliferasi* atau persebaran senjata nuklir kepada negara-negara *non-nuclear weapon states*, termasuk Korea Utara (Winarno, 2014: 261-262). Dalam mengagendakan perjanjian ini sebagai rezim, Amerika tentu membutuhkan aliansi kuat untuk mendorong berbagai upaya negosiasi. Dinamika terjadi ketika Korea Selatan sebagai mediator dan fasilitator AS mengalami transisi politik atas pergeseran rezim. Pada pemerintahan Moon, ia terlihat sangat kooperatif dalam menegosiasikan denuklirisasi hingga kepercayaan masyarakat pada rezim Moon meningkat. Namun pada pemerintahan Yoon, hingga saat ini belum ada negosiasi langsung berarti dari Korseul-Korut atas agenda denuklirisasi. Yoon bahkan

cenderung lebih menampakkan keagresivan pada aktivitas militer dalam memperkuat pertahanan negaranya bersama AS.

Program kedua merujuk pada program latihan gabungan militer tahunan ROK-US *Alliance*. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan SOFA (*The U.S–ROK Status Forces Agreement*) yang di sahkan pada tahun 1966 (Wysocka, 2012). Pada implementasi, program tersebut seharusnya diadakan setiap tahun. Namun pada lima tahun terakhir, beberapa persoalan menyebabkan fenomenadinamika dan kedilemaan yang disebabkan adanya transisi politik atau pergantian rezim. Pada pemerintahan Moon, muncul pandemi Covid-19 dan kebuntuan negosiasi soal kontribusi anggaran pertahanan (ROK-US), menyebabkan program ini mengalami penurunan signifikan. Penurunan tersebut juga sebagai bagian dari awal kebijakan Moon dalam menanggihkan program ini untuk melakukan pendekatan lebih kepada Pemerintah Korea Utara atas agenda denuklirisasi. Dan pada Pemerintahan Presiden Yoon, pelaksanaan program ini justru sebagai awal ia memulai politik luar negerinya di bidang kerjasama pertahanan. Dampak yang ditimbulkan ialah munculnya respon provokatif Presiden Kim hingga ketegangan kembali muncul di Semenanjung. Ini yang membuat tercapainya agenda denuklirisasi mendapat pandangan pesimistis dari publik.

Program	Moon Jae In (2017-2022)	Yoon Suk Yeol (2022)
Denuklirisasi	Penggunaan sejumlah alat <i>soft diplomacy</i> dalam membangun kerjasama dengan Korea Utara	Penawaran bantuan ekonomi ke Korea Utara dengan ketentuan syarat kesepakatan denuklirisasi
Latihan Gabungan Militer Tahunan ROK-US <i>Alliance</i>	Penangguhan dan penghapusan program <i>Ulchi Freedom Guardian</i> ROK-US tahun 2018-2019	Pengadaan <i>Ulchi Freedom Shield</i> pada 22 Agustus 2022

Tabel 1.1 Praktik kerjasama aliansi pertahanan ROK-US dalam dua program (2017-2022)

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa terjadi perbedaan kebijakan antara Presiden Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol terhadap spesifikasi dua program aliansi pertahanan (denuklirisasi sebagai agenda *non-proliferation nuclear* & latihan gabungan militer tahunan ROK-US *Alliance*) bersama Amerika Serikat tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membandingkan politik luar negeri Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol melalui persepsi kedua pemimpin terhadap kerjasama aliansi pertahanan bersama AS ke dalam tiga komponen utama (informasi, sistem keyakinan dan persepsi).
2. Menentukan dampak dan implikasi dari hasil perbandingan politik luar negeri Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol dalam kerjasama aliansi pertahanan bersama AS.
3. Menjelaskan respon aktor-aktor eksternal dalam implementasi dari kebijakan dua rezim, terutama Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para akademisi untuk memahami pergeseran rezim Korea Selatan (2017-2022) yang menentukan konsistensi politik luar negeri dalam kerjasama aliansi pertahanan bersama Amerika Serikat dalam mencapai stabilitas keamanan secara regional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi studi literatur yang merujuk pada kegiatan *civitas academica* dalam mengembangkan kajian yang mengarah pada permasalahan kemantapan arah politik luar negeri Korea Selatan sebagai penentu capaian program kerjasama aliansi pertahanan dengan AS dalam keberlanjutan agenda perdamaian semenanjung maupun Asia Timur sebagai kawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

- Bab I : Pendahuluan terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara historis *background* negara Korea Selatan dan kedua pemimpinnya Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol). Kemudian menjelaskan juga kerjasama di bidang militer dengan Amerika Serikat secara kontemporer sebagai alasan bagaimana dinamika bisa terjadi. Sub bab kedua mengenai rumusan masalah sebagai benang merah dalam memahami permasalahan utama untuk diteliti. Sub bab ketiga, tujuan penelitian digunakan sebagai maksud penelitian yang relevan dengan rumusan masalah. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis sebagai sebuah *value* dari adanya penelitian. Dan terakhir menjelaskan sistematika penulisan dari penelitian ini.
- Bab II : Tinjauan pustaka meliputi dua sub bab. Sub bab pertama berupa landasan teoritis sebagai tolak ukur agar penelitian bersifat rasional dan ilmiah. Sub bab kedua yakni penelitian terdahulu disusun untuk memahami isu dan permasalahan untuk dikaji.
- Bab III : Metodologi penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian yang mengacu pada penelitian kualitatif. Metode yang digunakan berupa metode komparatif dengan jenis diakronis. Pada bab ini juga dijelaskan bentuk referensi sebagai rujukan penelitian serta teknik pengumpulan datanya. Pada bab ini juga dijelaskan penggunaan landasan teori Ole R. Holsti dalam memahami persepsi dalam politik luar negeri seorang pemimpin dijadikan tolak ukur dalam membandingkan kedua pemimpin Korea Selatan (Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol).

- Bab IV : Analisis dan pembahasan mengenai perbandingan persepsi dalam politik luar negeri pemimpin Korea Selatan (Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol). Sesuai dengan kerangka teori sebagai tolak ukur, analisis ini menggunakan tiga komponen yang menghasilkan beberapa faktor. Tiga komponen utama meliputi informasi, sistem keyakinan dan persepsi pemimpin. Sedangkan faktor yang ada di dalam komponen terdiri dari kepentingan terdahulu sebagai informasi, *background* dan kepentingan partai sebagai sistem keyakinan, serta persepsi sebagai pola pikir pemimpin, dan dilanjutkan kebijakan luar negeri dalam kerjasama aliansi pertahanan dengan AS.
- Bab V : Penutup berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan riset.